

Pemetaan Arsip Tokoh Masyarakat Desa sebagai Bentuk Pelestarian Pengetahuan di Daerah Bekas Distrik Comal

Arif Rahman Bramantya^{1*}; Rina Rakhmawati¹; Machmoed Effendhie²

¹Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

²Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

*Korespondensi: arbramantya@ugm.ac.id

Abstract

This study explains the mapping of personal archives of Karangbrai community figures and head of village in the former of Comal district. In the context of village communities, characterizations of community figures are carried out through oral history to generations. In addition, the photographic archives has a vital role in supporting the visualization of the oral tradition. The data used in this study are in the form of primary and secondary data. Primary data obtained from observatory participation and interviews, while secondary data in the form of library materials, both in the form of books, journals, and mass media. The conclusion of this study is the strategy of selection and appraisal of personal record/archives carried out with a combination of neo-documentation approach and total archives consisting of observation, mapping of archives, and oral history. The strategy for the dissemination of documentation results is by optimizing village information systems. The results of the documentation are able to present the uniqueness of the communal identities. Knowledge preservation is the evidence of communal identity existence and it links the memory from the past in the present to the next generation.

Keywords: archives; documentation; karangbrai; mapping; community figure

Abstrak

Kajian ini menjelaskan tentang pemetaan arsip tokoh masyarakat dan pemimpin desa Karangbrai yang merupakan salah satu desa bekas distrik Comal. Dalam konteks masyarakat desa, penokohan seseorang dapat dilakukan melalui jalur sejarah lisan dari generasi ke generasi. Selain itu, arsip foto juga memiliki peran vital dalam mendukung visualisasi tradisi lisan tersebut. Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi partisipasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, maupun media massa. Kesimpulan dari kajian ini adalah strategi seleksi dan penilaian arsip personal dilakukan dengan kombinasi pendekatan neo-dokumentasi dan *total archives* yang terdiri dari tahapan observasi, pemetaan arsip, dan *oral history*. Adapun strategi diseminasi hasil dokumentasi yaitu dengan mengoptimalkan sistem informasi desa. Hasil dokumentasi mampu menghadirkan keunikan dari identitas masyarakat suatu daerah. Pelestarian pengetahuan merupakan bukti identitas masyarakat yang dapat menghubungkan memori dari generasi di masa lalu dengan generasi selanjutnya.

Kata Kunci: arsip; dokumentasi; karangbrai; pemetaan; tokoh masyarakat

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu bentuk wilayah yang dinilai strategis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi desa tidak hanya berkaitan dengan perkara agraris dan segala hal yang bersifat tradisional, tetapi menyangkut segala aspek yang berkaitan dengan sosial, budaya, keagamaan maupun ekonomi. Paska diberlakukannya undang-undang tentang desa serta pembentukan kementerian khusus yang menangani persoalan desa, potensi desa menjadi lebih banyak digali dan dimanfaatkan. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa pun memiliki beragam kewenangan, yaitu kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa).

Narasi sejarah menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pemerintahan desa di Jawa dan Madura mengacu pada reorganisasi pemerintahan. Salah satu usaha pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam mereorganisasi

pemerintahan di tingkat lokal tradisional yakni dengan dikeluarkannya aturan *Inlandsche Geemente Ordonantie* (IGO) tahun 1906. Pada periode VOC, nama desa di daerah Comal sebelum tahun 1833 sulit ditemukan. Comal di tahun 1813 merupakan nama sebuah desa tersendiri dan Comal sebagai wilayah akan muncul setelah pendirian Pabrik Gula Comal (Tjomal) di tahun 1833 (Boomgaard, 1996). Penyebutan daerah Comal hingga akhir abad ke-19, dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pada kondisi lahan, yaitu (1) lahan kering di bagian selatan, (2) lahan cukup subur di sekitar bagian tengah (Pos Semarang-Jakarta), (3) daerah rawa-rawa yang berada di bagian utara (Kano, Husken, & Suryo, 1996).

Mengacu pada laporan penelitian JFAC Van Moll dan H.'s Jacob tahun 1903-1904, terdapat hal-hal menarik yang dapat dijadikan sebagai perbandingan data bahwa mereka telah berhasil mendokumentasikan perubahan sosial ekonomi petani pedesaan Comal yang disusun dalam laporan khusus yang berjudul *De Desa-volkshuishouding in Cijfers* (Ekonomi Rakyat Desa dalam Angka). Hasil dokumentasi tersebut menjadi bahan perbandingan dalam penelitian di tahun 1990 dan 2012 dengan melibatkan para peneliti tiga Negara yang menyoroti permasalahan sejarah sosial ekonomi di daerah Comal.

Pada abad ke-20 sampai awal abad ke-21 introduksi pembangunan secara langsung berdampak pada modernisasi, mobilitas sosial dan perubahan dinamika rakyat di pedesaan. Pertumbuhan dan perkembangan tatanan ekonomi di tingkat desa menjadi indikator penting dalam kerangka sosial untuk mencapai tingkatan kehidupan masyarakat pedesaan yang adil dan makmur. Sementara itu, peran tokoh masyarakat dan pemimpin desa merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa yang pada gilirannya dapat menyejahterakan masyarakat. Meskipun corak administrasi pemerintahan di desa telah banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur administrasi pemerintahan kolonial, terdapat satu unsur yang berperan signifikan dalam pembangunan desa, yaitu tokoh masyarakat dan pemimpin desa.

Dapat dipahami bahwa proses dokumentasi peran tokoh masyarakat dan pemimpin desa dalam berbagai sumber dan media seharusnya dilestarikan dengan baik, mencakup isi informasi dan fisik arsip personal yang dimiliki. Karena arsip mencerminkan bukti aktivitas atau rekaman kegiatan seseorang yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Pembakaran arsip personal hampir terjadi di tahun 2018 oleh mantan Kepala Desa Karangbrai. Hal ini bisa terjadi karena pengetahuan yang kurang tentang pentingnya keberadaan arsip personal. Pelestarian arsip sebagai bukti identitas dan keunikan dari masyarakat suatu daerah yang satu pasti akan berbeda dengan daerah lain, terutama di daerah bekas distrik Comal. Pengadaan arsip personal tokoh masyarakat maupun pemimpin desa tanpa strategi dan perencanaan yang matang, maka akan menimbulkan permasalahan, yang merujuk pada hilangnya arsip. Oleh karena itu, praktik kerja dokumentasi dan kearsipan menjadi fondasi utama dalam pelestarian informasi di pedesaan (Sari, 2017).

Hasil dokumentasi pengalaman dan pengadaan arsip personal tokoh masyarakat ataupun pemimpin desa ke dalam sebuah biografi, tulisan maupun dalam kemasan audio visual, maka memori lintas generasi dapat mengambil pelajaran mengenai perjalanan hidup, pemikiran dan strategi dalam pembangunan dan pemberdayaan desa (Sari, 2017). Pada dasarnya proses dokumentasi dan pengadaan arsip personal tidak harus mengacu pada tokoh-tokoh besar, tetapi tokoh masyarakat dan pemimpin desa pun dapat dijadikan sebagai objek. Seperti diketahui bahwa berbagai bentuk ragam pengetahuan yang terdapat pada arsip tokoh masyarakat dan pemimpin desa berakar pada lingkungan masyarakat yang seharusnya terdokumentasi dengan baik dan secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pelestarian pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mampu menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya manusia dan alam sekitar, khususnya di pedesaan, sehingga mereka dapat bertahan hidup di era revolusi industri saat ini. Oleh karena itu, memahami bagaimana peran tokoh masyarakat desa maupun pemimpin desa

dengan segala keanekaragaman yang terdapat di dalam desa melalui praktik kerja dokumentasi dan kearsipan menjadi studi yang menarik. Objek penelitian ini merujuk pada Desa Karangbrai (wilayah selatan) yang merupakan daerah lahan kering dan memiliki sejarah panjang terkait pembakaran salah satu dusun Karyomukti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Darul Islam (Bramantya, 2018). Karakteristik desa sebelah selatan tentu akan berbeda dengan desa sebelah utara yang cukup maju dengan budidaya tambak sebagai aktivitas non pertanian yang memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat (Effendhie, 1990).

Permasalahan pokok yang dihadapi di daerah pedesaan sebagian besar mengacu pada kebutuhan pelestarian pengetahuan maupun aspek sosial budaya masyarakat desa dari berbagai sumber, baik arsip, dokumen konvensional maupun dokumen media baru. Dalam sebuah kongres IFLA (*International Federation of Library Associations and Institutions*) tahun 2014 menjelaskan bahwa perpustakaan dan lembaga kearsipan seharusnya bersama-sama bekerja untuk pelestarian *Indigenous Knowledge* (Adelia, 2016). Pemetaan tokoh masyarakat desa dan pemimpin desa di bekas Distrik Comal merupakan salah satu upaya pengadaan arsip personal yang seharusnya dapat dilestarikan sesuai dengan kaidah kearsipan. Oleh karena itu, kebutuhan pelestarian arsip harus didukung oleh program seleksi yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pemetaan dan model diseminasi konten arsip personal yang tepat dalam upaya melestarikan pengetahuan desa bekas distrik Comal?

Dinamika tokoh dan penokohan serta interaksi tokoh dengan masyarakat desa kerap diwariskan secara turun temurun lintas generasi. Bagi generasi tua, model pewarisan tersebut, biasa disebut dengan tradisi lisan. Sayangnya, tradisi lisan mulai mengalami kepunahan sebab tidak banyak generasi muda yang dapat melanjutkan atau bahkan dengan sengaja tradisi tersebut dihilangkan. Meski demikian, ada pula yang mewariskan dinamika dan peran tokoh masyarakat desa melalui dokumen, baik berupa dokumen tekstual maupun dokumen bentuk khusus. Kesadaran untuk mendokumentasikan tokoh masyarakat desa umumnya muncul dari warga desa yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi maupun dari pengalaman berinteraksi dengan masyarakat di luar desa yang memiliki kesadaran pendokumentasian yang tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, informasi mengenai desa dan tokoh-tokohnya mulai bermunculan. Namun, kebenaran mengenai informasi yang mudah diakses tersebut kerap terbentur dengan berita-berita tidak jelas. Oleh sebab itu, dibutuhkan bukti pendukung berupa dokumen yang otentik dan terpercaya, yaitu arsip.

Istilah arsip dengan dokumen, dalam konteks Indonesia, kerap saling menggantikan. Sebagian akademisi maupun praktisi, berpendapat bahwa tidak semua dokumen dapat dikatakan sebagai arsip (Sulistyo-Basuki, 2004). Hal ini didasarkan pada karakter arsip yang tidak ditemukan pada klasifikasi dokumen lainnya, seperti bahan pustaka maupun artefak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, karakter arsip yang masih berbasis pada pemahaman konvensional abad ke 20 semakin tidak relevan. Sesuatu dikatakan sebagai arsip tidak lagi berpatokan pada wujud media rekam, namun lebih pada aspek konten dan konteks yang melingkupinya. Pergeseran paradigma dasar mengenai arsip pun berdampak pada konsep pengelolaan yang dilakukan. Secara sepintas, media rekam arsip personal tidak jauh berbeda dengan arsip yang ditemukan dalam konteks organisasi. Tetapi, jika ditinjau dari segi konten, konteks, maupun pemanfaatan, arsip personal memiliki karakter informasi yang lebih bervariasi. Maka dibutuhkan model pengelolaan yang lebih relevan dengan karakter arsip personal tersebut.

Dokumen dapat dimaknai sebagai objek yang merekam informasi dengan tidak memandang media maupun bentuknya (Sulistyo-Basuki, 2004). Definisi tersebut selaras dengan makna arsip sebagai media rekam dalam konsep *total archives*. Konsep *total archives* muncul di Kanada pada

kisaran abad ke-19. Kemunculan konsep tersebut dilatarbelakangi oleh konteks sosial budaya, yaitu keyakinan dan kesadaran masyarakat Kanada. Pada masa itu, masyarakat menganggap bahwa arsip sebagai warisan budaya. Keyakinan dan kesadaran tersebut kemudian memunculkan rasa tanggung jawab untuk mengumpulkan dan melestarikan beragam jenis arsip dan dari berbagai sektor. Menurut Millar (1999) dalam *The Spirit of Total Archives*, kemunculan konsep tersebut dibagi dalam tiga fase, yaitu: (1) Periode 1800an – 1970an, munculnya kesadaran masyarakat Kanada untuk melestarikan arsip sebagai warisan budaya yang diiringi dengan berdirinya sejumlah lembaga kearsipan sektor publik; (2) Periode 1970an – 1990an, kegiatan pelestarian arsip mengalami pergeseran tanggung jawab, yang semula menjadi kewenangan lembaga kearsipan sektor publik, mulai dilakukan desentralisasi. Pelestarian arsip mulai didelegasikan ke sektor privat melalui model kerja sama dan kolaborasi; dan (3) Periode 1990an, selain sektor publik dan privat, tanggung jawab pengelolaan arsip juga mulai didelegasikan ke komunitas-komunitas kearsipan yang berasal dari masyarakat.

Dalam konsep *total archives* tidak menekankan pada jenis media yang harus dilestarikan, maka proses pengelolaan arsip seharusnya dapat melingkupi berbagai jenis media arsip, termasuk arsip bentuk khusus. Dalam ilmu kearsipan, arsip dengan bentuk khusus ada kalanya diperlakukan sebagai dokumen, misalnya dokumen surat kabar, dokumen karya seni, dokumen poster, dan sebagainya. Pada dasarnya, proses pengelolaan dokumen dengan arsip tidak banyak perbedaan. Menurut Sulistyio-Basuki (2004), kegiatan pengelolaan dokumen terdiri dari: 1) menciptakan/produksi; 2) menerbitkan, menghimpun, menyunting; 3) pengembangan koleksi, temu balik dokumen, pemilihan dokumen; 4) pengolahan informasi, katalogisasi, klasifikasi, indeksasi; 5) pendayagunaan koleksi, pembuatan abstrak, penyusunan bibliografi, analisis data, tinjauan literatur; 6) penyimpanan dokumen; 7) temu balik; 8) pemberian jasa, jawab pertanyaan referensi, sirkulasi dokumen, reproduksi dokumen; 9) jasa operasional dan administrasi. Pada pengelolaan arsip, jika menggunakan pendekatan siklus hidup, terdiri dari: penciptaan, penggunaan dan pengelolaan, penilaian dan penyusutan, akuisisi, penataan dan pendeskripsian, pelestarian, serta akses dan layanan. Kajian ini akan berfokus pada kegiatan pemilihan atau seleksi atau dalam ilmu kearsipan disebut sebagai penilaian dokumen dalam kerangka pelestarian informasi sejarah dan tradisi lokal, khususnya terkait tokoh masyarakat dan pemimpin desa.

Kegiatan seleksi dan penilaian dokumen berkaitan erat dengan konsep dasar mengenai dokumen dan arsip. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pembatasan antara dokumen dan arsip cenderung mengalami pengaburan hingga sulit dibedakan dengan tegas. Namun secara karakteristik informasi, arsip memiliki karakteristik spesifik, yaitu (Duranti dan Franks, 2017): (1) *Interrelatedness*, dapat dipahami sebagai keterkaitan antara kegiatan atau peristiwa dengan arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau peristiwa tersebut; (2) *Uniqueness*, dipahami sebagai keterkaitan antar dokumen dalam suatu lembaga kearsipan maupun antar dokumen dalam lembaga kearsipan yang berbeda; (3) *Naturalness*, dipahami sebagai arsip tercipta karena adanya kegiatan dan tidak disengajakan untuk diciptakan; (4) *Impartiality*, dipahami sebagai arsip diciptakan untuk memenuhi utamanya kepentingan pencipta arsip; dan (5) *Authenticity*, proses autentikasi terdiri dari autentikasi fisik media dan autentikasi format.

Sedangkan konsep dokumen, hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Istilah dokumen dipopulerkan oleh Suzan Briett melalui kerja analisisnya pada tahun 1951. Menurut Briett, dokumen dipahami sebagai *...any physical or symbolic sign, preserved or recorded, intended to represent, to reconstruct, or to demonstrate a physical or conceptual phenomenon*. Buckland (2009) mencirikan dokumen dalam tiga perspektif, yaitu: (1) *Conventional view*, mengacu pada dokumen fisik; (2) *Functional view*, mengacu pada sesuatu objek yang memiliki fungsi sebagai dokumen; dan (3) *Semiotic view*, mengacu pada sesuatu objek yang dipersepsikan seolah berfungsi sebagai dokumen.

Jika dikaitkan dengan konteks arsip tokoh masyarakat dan pemimpin desa, karakter dokumen menurut Buckland dapat diimplementasikan, khususnya dalam proses seleksi dan penilaian arsip dengan bentuk informasi yang dikemas dalam media audio. Namun demikian, kajian seleksi dan penilaian arsip personal dengan basis konsep dokumentasi belum dilakukan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Prosedur penyeleksian dan penilaian arsip personal yang berlaku di Indonesia, masih dilakukan sebagaimana proses seleksi dan penilaian pada arsip institusi.

Di sisi lain, kajian mengenai pemetaan tokoh masyarakat dalam rangka pelestarian arsip personal tokoh masyarakat desa menjadi perhatian penting sebagai upaya pelestarian fisik dan informasi arsip. Menurut Sari (2017), pemetaan arsip tokoh masyarakat merupakan kegiatan strategis dalam upaya pengembangan koleksi arsip personal yang diharapkan bermanfaat bagi pengguna dan lembaga kearsipan. Arsip personal dapat menjadi pembelajaran bagi generasi selanjutnya untuk mengembangkan daerahnya. Pengadaan arsip personal perlu dilakukan untuk menjaga kekayaan daerah. Program seleksi arsip dapat dimulai dari penyusunan kerangka kebijakan, pencarian data tokoh masyarakat, identifikasi dan pemetaan arsip hingga observasi mendalam pada tokoh untuk melihat jenis dan kondisi arsip. Kajian yang dilakukan oleh Sari (2007) merujuk pada daerah Kulonprogo, Yogyakarta.

Program pengadaan arsip terkait dengan proses seleksi dan penilaian nantinya akan berpengaruh pada kegiatan pelestarian fisik arsip. Kajian yang dilakukan oleh Fleckner (1977) dan Ham (1993) menekankan pentingnya proses seleksi dan penilaian arsip, termasuk pada arsip personal. Bertambahnya bentuk dokumentasi seiring dengan perkembangan teknologi menuntut arsiparis untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam merencanakan program kearsipan.

Dari beberapa tinjauan tersebut di atas, kajian ini berupaya untuk menekankan pentingnya pelestarian arsip melalui pemetaan tokoh masyarakat desa maupun pemimpin desa dengan kerja dokumentasi. Dalam konteks pelestarian *Indigenous Knowledge*, menurut UNESCO termasuk dalam praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak dan ruang kebudayaan, dikenal oleh suatu komunitas maupun individu-individu. Jika dikaitkan dengan konsep tersebut, jelas bahwa arsip tokoh masyarakat desa maupun pemimpin desa merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang mengandung pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, wawancara, dan observasi yang dinarasikan dengan pendekatan kualitatif. Pertama, perlu untuk mencari data dari berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menuangkan pokok masalah dari sumber-sumber pustaka yang ada di dalam buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik pemetaan arsip tokoh masyarakat desa. Penulis menggunakan sumber pustaka yang didapat dari Perpustakaan UGM, Perpustakaan Provinsi DIY, Perpustakaan Provinsi Jawa tengah, dan sumber dari internet. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dengan berbagai latar belakang, diantaranya mantan kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, juru kunci, dan pemuka agama. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran penelitian yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Suwadi, 2014). Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam tokoh masyarakat desa maupun pemimpin desa terkait informasi-informasi pengalaman masa lalu juga merupakan proses untuk mendapatkan bukti aktivitas yang nantinya akan dianalisis. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik deksriptif kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan metode *purposive*, yaitu di wilayah bekas distrik Comal, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya. Waktu penelitian dilakukan tahun 2019-2020.

Untuk mendukung hasil penelitian ini, pengamatan secara langsung sudah dilaksanakan selama dua bulan penuh ketika ikut berpartisipasi sebagai asisten peneliti dalam penelitian lapangan bulan Juli-September 2012. Penelitian dilaksanakan melalui kerjasama internasional di bawah naungan universitas antara Universitas Gadjah Mada, University of Amsterdam (UvA) dan Center of Southeast Asian Studies (CSEAS), Universitas Kyoto. Di tahun 2017-2018, peninjauan kerjasama penelitian dilakukan dengan CSRI (Cultural Symbiosis Research Institute), Universitas Prefektur Aichi, sebagai peneliti tamu (*visiting researcher*). Dari hasil pengamatan tersebut, penulis masih memiliki daftar nama-nama tokoh masyarakat desa maupun pemimpin desa Karangbrai yang menjadi pedoman dalam melakukan metode *oral history*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan masyarakat pedesaan dalam domain Kearsipan

Aspek kebudayaan dapat pula mengarah pada kehidupan pribadi dan sosial. Diketahui bahwa kehidupan masyarakat pedesaan Jawa memegang erat tradisi, khususnya hubungan sesama individu dalam proses produksi maupun tradisi lokal yang dimiliki. Tradisi lokal pedesaan dalam sudut pandang sosial dapat pula dimaknai sebagai praktik, pengetahuan, keterampilan, maupun kebudayaan yang dapat mengacu pada istilah *Indigenous Knowledge*. UNESCO mendefinisikan *Indigenous Knowledge* sebagai pemahaman, keterampilan dan filosofi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan sejarah panjang interaksi dengan lingkungan alamnya. Dalam masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, *Indigenous Knowledge* menginformasikan pengambilan keputusan tentang aspek fundamental kehidupan sehari-hari, mengarah pada dinamika kehidupan masyarakat. *Indigenous Knowledge* merupakan bagian integral dari budaya yang bersifat kompleks, dapat mencakup bahasa, sistem, praktik pemanfaatan sumber daya, interaksi sosial, ritual dan spiritualitas. Program UNESCO dalam Local Indigenous Knowledge Systems (LINKS) menjelaskan bahwa *Indigenous Knowledge* juga memberikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat. *Indigenous Knowledge* bersifat lokal, terkait dengan tempat dan serangkaian pengalaman tertentu, serta dapat ditransmisikan secara lisan, mengacu pada keterlibatan praktis kehidupan sehari-hari, diperkuat oleh pengalaman, serta mencakup pengetahuan empiris daripada teoritis (Cordell, 1995). Selain itu, *Indigenous Knowledge* dapat dibagi ke tingkatan yang jauh lebih kompleks daripada bentuk pengetahuan lainnya dalam dunia akademis. *Indigenous Knowledge* dapat ditempatkan dalam tradisi budaya yang lebih luas dengan memisahkan antara aspek teknis dari non teknis (Ellen & Harris dalam Joranson, 2008)

Perlunya memperluas diskusi tentang bagaimana masyarakat lokal di pedesaan dapat terfasilitasi untuk membawa model praktik, pengetahuan dan budaya mereka ke dalam kajian akademis serta pemahaman sistem pengetahuan tradisional yang kental dengan kearifan lokal, menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari domain kearsipan. Ranah kearsipan memiliki tanggung jawab dalam pendokumentasian, pengelolaan serta mendiseminasikan informasi khususnya produk pengetahuan yang terdapat di pedesaan. Pengalaman hidup seseorang dan narasi sejarah kehidupan masyarakat setempat, khususnya di pedesaan sebagai bentuk pengetahuan tradisional akan memperkaya diskursus ilmiah tentang bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan tersebut dapat dipergunakan dalam pengembangan komunitas masyarakat (Arnold, 2017).

Indigenous Knowledge biasanya tidak tertulis dan tergantung pada transmisi lisan dan wadah memori di dalam masyarakat. Pada dasarnya *Indigenous Knowledge* relevan dengan pemikiran, sistem sosial, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Pengembangan dalam bidang seni, musik, bahasa, pertanian, kedokteran, kerajinan tangan, teater dan manajemen sumber daya alam dengan memperhatikan aspek pengetahuan di dalamnya menjadi perhatian tersendiri. Hal ini

penting untuk bagaimana memperlakukan pengetahuan tersebut agar dapat dijaga dan dilestarikan. Maka menjadi keharusan bahwa *Indigenous Knowledge* selayaknya didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memperoleh manfaat yang diberikan dan dapat berkontribusi terhadap solusi permasalahan yang dihadapi manusia (Ryser, 2012)

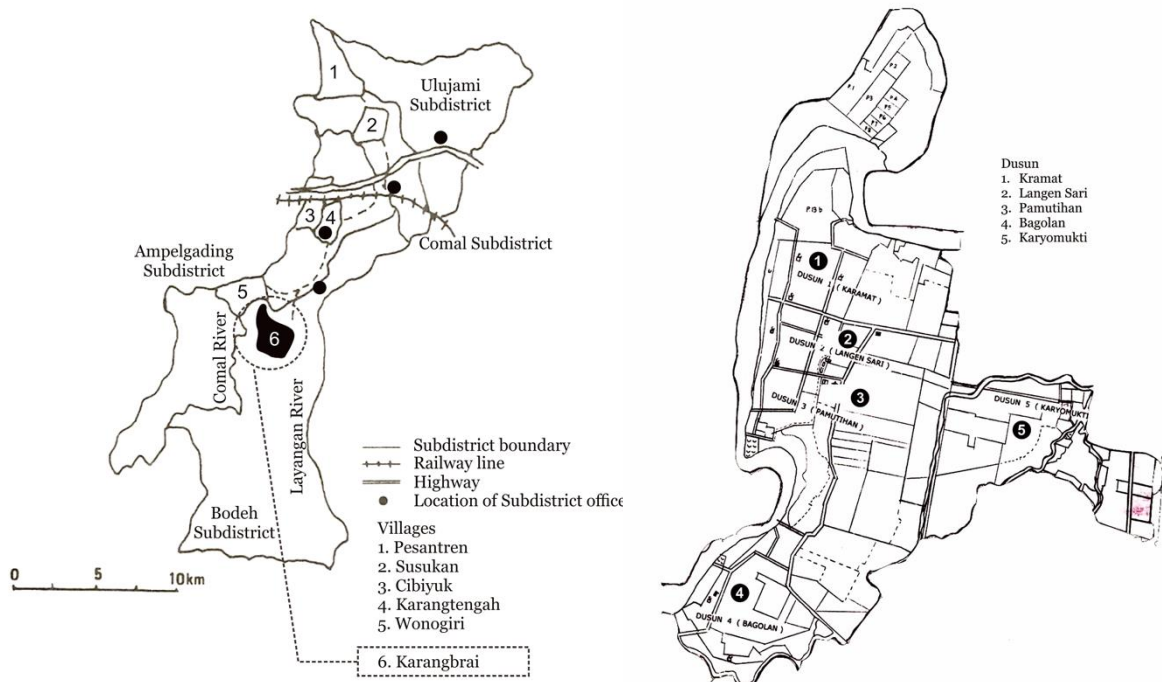
Komunitas masyarakat perlu berpartisipasi penuh dalam pertukaran global dan penyebaran informasi untuk berkembang secara sosial, budaya, dan ekonomi. Dokumentasi pengetahuan di pedesaan untuk tujuan komunikasi dan pembelajaran edukatif dalam bentuk cetak, audiovisual dan elektronik layak dipertimbangkan. Di sisi lain, menyoroti beragam tantangan yang dihadapi oleh lembaga perpustakaan maupun kearsipan dalam hal teknis serta strategi pedokumentasian perlu didukung dan diapresiasi oleh masyarakat. Lembaga perpustakaan dan kearsipan harus mengkoordinasikan kegiatan mereka dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan lembaga pendanaan lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut (Okorator, 2010).

Membangkitkan *Indigenous Knowledge* masyarakat pedesaan melalui dokumentasi sosial budaya sangat mungkin untuk dipelajari secara mendalam tentang bagaimana perkembangan komunitas masyarakat tersebut. Di sisi lain, penyebaran pengetahuan secara progresif tanpa memperhatikan hak komunitas masyarakat lokal secara tidak langsung akan mengancam kosmologi terkait *Indigenous Knowledge* di dalamnya. Oleh karena itu, penting dalam memperhatikan bagaimana pendekatan yang tepat dan cara dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, mengumpulkan, dan mensistematisasikan *Indigenous Knowledge* agar berguna bagi kehidupan (Agrawal, 2005).

Urgensi pentingnya penelitian tentang pengetahuan masyarakat pedesaan berasal dari asumsi bahwa tradisi lisan yang masih kental di pedesaan akan lambat laun menghilang. Tingkat penghilangannya kemungkinan cepat dan akan bertambah karena tidak ada upaya strategis dalam hal pendokumentasian. Beberapa tradisi lisan tersebut kemungkinan berharga untuk tetap menjaga sejarah desa. Nilai yang dibicarakan dalam *Indigenous Knowledge* memang cukup spesifik. Hal itu berguna dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, untuk pengembangan pengetahuan, dan lain sebagainya (Joranson, 2008). Mutualisme antara *Knowledge Common* dan *Indigenous Knowledge* dapat diartikulasikan sebagai hubungan yang dapat memberikan panduan dalam pengembangan praktik dan kebijakan yang didasarkan pada kualitas yang melekat padanya. Hal ini akan memperkuat wacana dan praktik pengetahuan bersama (Nakashima, 2010).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam praktik dokumentasi dan kearsipan harus dapat mengidentifikasi dan menganalisis potensi budaya lokal di dalam masyarakat pedesaan, baik melalui penelitian, sensus ataupun program pengabdian masyarakat. Praktik-praktik kerja tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pendampingan pengelolaan dokumen, baik itu dokumen keluarga maupun dokumen-dokumen tentang desa. Praktik ini lebih menitikberatkan pada pengaturan dokumen konvensional dan identifikasi kebutuhan untuk mentransfer keterampilan tentang bagaimana pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan. Kedua, melalui program sejarah lisan (*oral history*). Praktik ini mengacu pada wawancara tokoh masyarakat dan pemimpin desa yang berpengaruh besar terhadap perkembangan desa. Ketiga, melalui dokumentasi kegiatan budaya lokal pedesaan. Praktik-praktik tersebut akan menjadi rangkaian yang berkesinambungan dalam rangka pemetaan potensi desa (Susanti, Bramantya, & Ridhollah, 2019)

Pemetaan dan Dokumentasi Tokoh Masyarakat Desa Melalui Metode *Oral History*



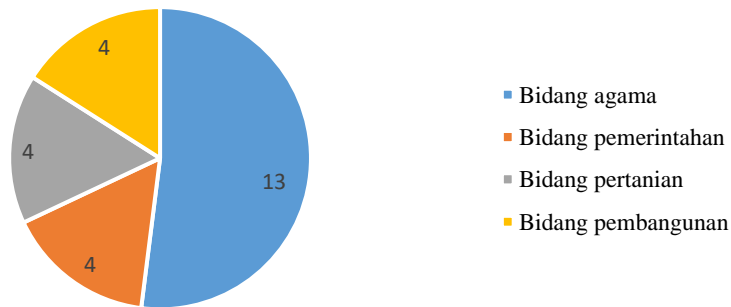
Gambar 1. Salah satu daerah bekas distrik Comal desa Karangbrai
Sumber: Husken et al. (1996)

Desa Karangbrai mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan desa Jraganan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Payung, sebelah barat berbatasan dengan desa Tegal Sari, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Kebandaran. Desa Karangbrai memiliki luas wilayah sebesar 324. 283 Ha dan terdiri dari 5 dusun, yaitu dusun Karyomukti, Langensari, Pamutihan, Kramat, dan Bagolan. Masing-masing dusun memiliki karakter kehidupan masyarakat yang berbeda. Masyarakat Jawa dalam perspektif struktur sosial dapat dibagi menjadi tiga sub-kultur yaitu Abangan, Santri, dan Priyayi. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Jawa, karakteristik kelompok Abangan mengarah pada aspek animistik. Sedangkan kelompok Santri menekankan pada aspek keislaman. Kelompok priyayi lebih menekankan pada aspek Hindu. Masing-masing menampilkan citra budaya dan keagamaan yang berbeda-beda (Geertz, 1981).

Kehidupan masyarakat desa Karangbrai lebih bercirikan priyayi-santri. Dusun Pamutihan dan Langensari merupakan dusun santri. Dusun Bagolan dan Karyomukti yang jauh dari pusat pemerintahan desa mempunyai karakteristik dusun abangan. Abangan dan santri tidak selalu bersifat antagonis tetapi merupakan refleksi dari gejala kultural dan pemahaman agama (Kuntowijoyo, 1993). Proses transformasi dari *wong cilik* bisa menjadi priyayi, dari priyayi bisa menjadi santri, dan bahkan dari abangan bisa menjadi santri. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya transformasi bisa saja karena modernisasi, perkembangan politik, pendidikan dan peran elite Islam di desa Karangbrai. Adapun hasil pemetaan tokoh masyarakat dan pemimpin desa yang selama ini berpengaruh dalam perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa Karangbrai sebagian besar didominasi oleh tokoh agama. Dari hasil identifikasi, terdapat 25 tokoh yang terdiri dari tokoh agama, pemerintahan, pertanian, dan pembangunan. Arsip yang dimiliki secara perorangan maupun lembaga pemerintahan desa terdiri dari foto, arsip konvensional, catatan tertulis, dan koleksi pribadi. Lembaga pemerintahan desa mendorong agar tokoh masyarakat dapat membuka dan menyediakan arsip sesuai dengan kesepakatan dan tetap berpegang pada hak kepemilikan. Lembaga pemerintahan desa pun memiliki peran yang

signifikan sebagai tempat penyimpanan dan menerima arsip personal tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan desa.

Pemetaan tokoh masyarakat desa Karangbrai



Gambar 2. Pemetaan Tokoh Masyarakat Desa Karangbrai
Sumber: Data Observasi Penulis, 2019

Untuk mendukung pemetaan arsip tokoh masyarakat desa, metode *oral history* diupayakan agar dapat memberikan pemahaman mengenai perjalanan hidup tokoh masyarakat desa.

Tokoh pendiri yayasan Ianah Futuhiyah

Terkait dengan tokoh dalam bidang pembangunan, sekitar tahun 1980-an, Kepala Desa Karangbrai dan tokoh masyarakat mendirikan yayasan bernama Ianah Futuhiyah yang berkecimpung di dunia pendidikan. Tujuan dari pendirian yayasan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat Karangbrai serta meneruskan perjuangan tokoh terdahulu dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Pendiri dari yayasan ini adalah H. Harsono, H. M. Rojab, H. Bukhori, Suhari, Ngadimin, Parmidi, dan H. Ngaelan. Sedangkan untuk pengurus yayasan saat ini dipimpin oleh H. Fahrozi, sekretaris dipegang oleh Rosihan Asgaph, bendahara dari Tokoh Agama, anggota seksi masing-masing perwakilan dari setiap Mushola. Pada dasarnya, gedung yang dibangun merupakan milik yayasan, namun tanah yayasan merupakan milik pemerintahan desa. Yayasan ini memiliki Pondok Pesantren, Masjid, dan Madrasah (H. Harsono, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019).

Kyai Abdusyapur, pendiri pondok pesantren pernah menjadi penasehat yayasan pada tahun 1980-an. Kyai Abdusyapur bersama pendiri yayasan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun Madrasah Tsanawiyah di desa Karangbrai. Aspek keagamaan di desa Karangbrai tidak memiliki pergeseran serta perubahan yang signifikan. Kegiatan rutin seperti tahlilan, yasinan, pengajian rutin, dan kegiatan remaja masjid masih terlaksana rutin setiap minggunya. Sedangkan untuk kearifan lokal seperti sedekah bumi, nyadran, dan tradisi lainnya masih tetap terpelihara dan terlaksana hingga saat ini. Untuk kegiatan kemasyarakatan berjalan efektif di masing-masing mushola tiap dusun, mengingat kegiatan-kegiatan dari setiap mushola menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan. Terdapat 13 mushola di desa Karangbrai. Dari masing-masing mushola tersebut, beberapa dibangun atas permintaan warga masyarakat yang sukarela untuk mewakafkan tanahnya. Kelengkapan arsip dan dokumen mengenai pembangunan yang masih tersimpan disimpan di Kantor Desa.

Kyai Abdusyapur: pendiri pondok Pesantren As-Sallafi

Terkait dengan tokoh dalam bidang keagamaan, kyai Abdusyapur mendirikan pondok pesantren bernama As-Sallafi di bawah yayasan Ianah Futuhiyah pada tahun 1982. Dengan

adanya sarana pendidikan keagamaan ini diharapkan menjadi wadah pengembangan pendidikan dan karakter untuk pemuda dan masyarakat Karangbrai. Anak keturunan Abdusyaktur adalah Hamam Haris yang merupakan generasi penerus dari Pondok pesantren yang diwariskan oleh orang tuanya, karena Abdusyaktur meninggal dunia pada tahun 2006. Hamam Haris diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan agama dan memimpin pondok pesantren. Hamam Haris menempuh pendidikan di IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Gambar 3. Kyai Abdusyaktur

Sumber: Dokumentasi mahasiswa KKN Universitas Diponegoro tahun 1996

Tujuan dari pondok pesantren ini adalah untuk menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan pondok pesantren diharapkan dapat membantu masyarakat Karangbrai supaya lebih mengenal dan mengetahui pentingnya ajaran Islam, khususnya pada generasi muda, mengingat generasi muda di Desa Karangbrahi saat ini lebih mementingkan orientasi bekerja dibanding menuntut ajaran Islam. Pondok Pesantren yang saat ini dipimpin oleh Hamam Haris berdiri secara formal pada tahun 1984, namun sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan. Dari tahun 2006 hingga 2019, rata-rata santri per tahun yang masuk ke Pondok Pesantren Desa Karangbrai berjumlah sekitar 50 orang (Hamam Haris, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019).

Santri dari Pondok Pesantren sebagian besar berasal dari warga Karangbrai, serta sebagian kecil dari luar desa. Pondok pesantren ini sebenarnya dikhususkan untuk warga Karangbrai, mengingat masih banyak ditemui beberapa warga yang kurang mampu untuk membiayai anaknya bersekolah atau “mondok” di luar desa. Pendidikan santri di pondok secara umum mengacu pada lembaga pendidikan formal, dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan (Hamam Haris, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019).

Kegiatan-kegiatan santri dilakukan di dalam pondok. Kegiatan di luar pondok hanya dilakukan ketika ada undangan resmi seperti perkemahan akbar yang diorganisir oleh IPNU, dan kegiatan tahunan lainnya. Pemerintah desa selama ini sangat mendukung adanya pondok pesantren di Desa Karangbrai. Pondok pesantren dapat memberikan pengaruh positif dan moralitas masyarakat desa dapat terbentuk. Selain itu, dengan adanya Pondok Pesantren juga akan mengangkat nama dan citra Desa Karangbrai. Desa Karangbrai juga terdapat Madrasah Diniyah dan Madrasah Tsanawiyah. Rencananya juga akan didirikan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah serta Pendidikan Tinggi berbasis Islam.

Hamam Haris mengutarakan bahwa melaksanakan wasiat orang tua menjadi tanggung jawab serta amanah yang harus dilaksanakan. Selain itu, ia bangga dan tergugah untuk terus mengawal kepemimpinan pondok pesantren ini guna menjaga stabilitas moral dan norma masyarakat desa Karangbrai. Arsip dan dokumen terkait dengan pondok pesantren yang terdiri arsip foto dan arsip tekstual masih disimpan oleh Hamam Haris.

Sohadi: juru kunci petilasan Syekh Jambu Karang

Desa Karangbrai dikaitkan dengan keberadaan petilasan dan makam, diantaranya petilasan Syekh Jambu Karang dan makam Syekh Bukojati serta makam *dowo* (panjang). Keberadaan petilasan dan makam syekh tersebut dapat dikaitkan dengan proses penyebaran agama Islam di desa Karangbrai dan sekitarnya. Di sisi lain, terdapat makam *dowo* yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis bersifat negatif. Tidak sedikit masyarakat Pematang yang berziarah ke Patilasan Syekh Jambu Karang (Sohadi dan Jono, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2019). Revitalisasi petilasan Syekh Jambu Karang dilakukan pada masa kepala desa Casmirah dengan bantuan dana dari Kabupaten Pematang. Dokumen mengenai revitalisasi petilasan dan hasil tradisi lisan keberadaan petilasan serta makam tersebut tersimpan di Kantor Desa Karangbrai.



Gambar 4. Petilasan Syekh Jambu Karang tahun 1996 dan 2012

Sumber: Dokumentasi Tim KKN Universitas Diponegoro (kiri) tahun 1996 dan Arif Rahman Bramantya (kanan) tahun 2012



Gambar 5. Petilasan Syekh Jambu Karang tahun setelah di Revitalisasi
Sumber: Dokumentasi Arif Rahman Bramantya tahun 2019

Dulbari: veteran perang

Dulbari merupakan seorang veteran perang yang pada akhirnya bekerja sebagai ulu-ulu desa Karangbrai. Dulbari bekerja sebagai ulu-ulu sejak 10 Oktober 1958 dan telah bekerja selama 49 tahun (Fatchuriyah, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2019). Dulbari diangkat sebagai Ulu-Ulu oleh Kepala Desa Oesman. Beberapa dokumen dan arsip tentang Dulbari masih disimpan oleh keturunannya yaitu Fatchuriyah (anak Dulbari). Fatchuriyah saat ini menjabat sebagai kepala urusan umum dan perencanaan desa Karangbrai ketika penulis melakukan penelitian di tahun 2019.



Gambar 6. Lencana

Sumber: Dokumentasi Arif Rahman Bramantya tahun 2019

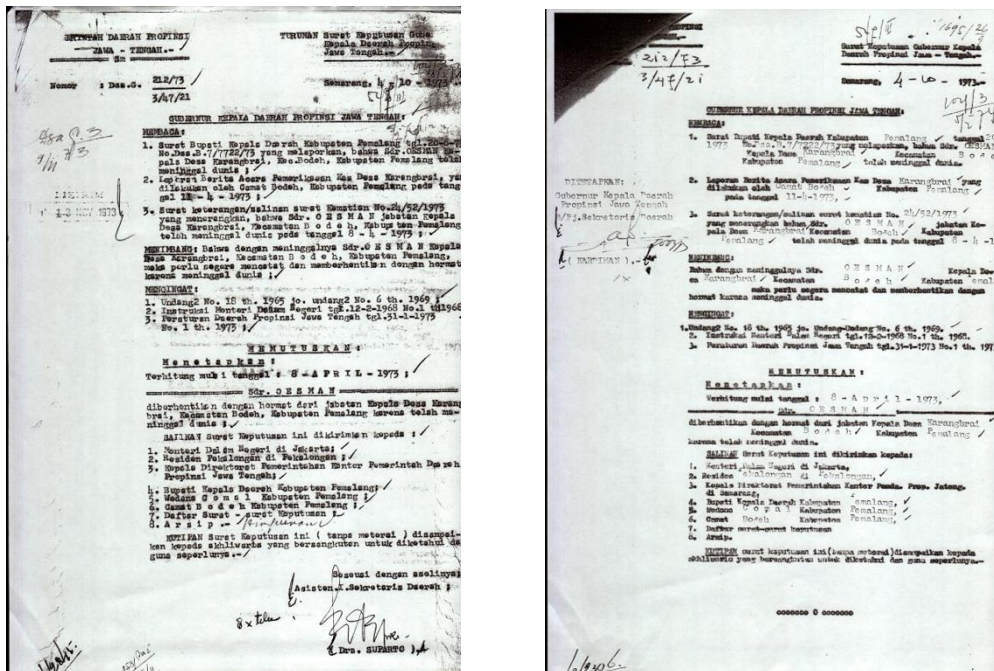
Oesman: Kepala Desa periode 1950-1974

Menurut catatan penelitian Kusumindarti (1990), kepala desa Rekso Sukaryo merupakan kepala desa yang paling dikenal oleh masyarakat desa Karangbrai. Rekso Sukaryo merupakan kepala desa yang paling lama masa jabatannya yakni sekitar 40 tahun (1908-1948). Setelah Peristiwa Tiga Daerah yang terjadi di Brebes, Tegal, Pemalang tahun 1949, Rekso Sukaryo mengundurkan diri karena sudah merasa tua. Rekso Sukaryo merupakan kepala desa yang mempunyai kewibawaan luar biasa di mata masyarakat. Pada saat agresi militer Belanda tahun 1947-1948, terjadi pengangkatan kepala desa baru Recomba. Rekso Sukaryo yang pada saat itu masih menjabat sebagai kepala desa tidak mendukung pemerintahan Belanda, maka Ia pun mengungsi. Sebagai gantinya, ditunjuklah Mukhayat (kepala desa Recomba) sebagai kepala desa untuk memimpin desa Karangbrai. Namun jabatannya hanya sampai pada penyerahan pengembalian pemerintahan Republik Indonesia (Kusumindarti, 1991).

Pengganti Kepala desa Rekso Sukaryo adalah Oesman. Oesman merupakan anak dari Rekso Sukaryo. Menurut pandangan masyarakat pada waktu itu bahwa Oesman merupakan salah satu pemimpin desa yang dermawan. Oesman pernah merelakan hasil dari tanah bengkoknya untuk kepentingan pembangunan jalan desa. Pembakaran dusun Karyomukti oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Darul Islam terjadi ketika pemerintahan Kepala Desa Oesman. Rumah Oesman pun tidak luput dari pembakaran. Oesman meninggal sekitar tahun 1974. Saat ini nama Oesman diabadikan sebagai nama jalan kecil di desa Karangbrai (H. Harsono, komunikasi pribadi, 16 Agustus 2019)



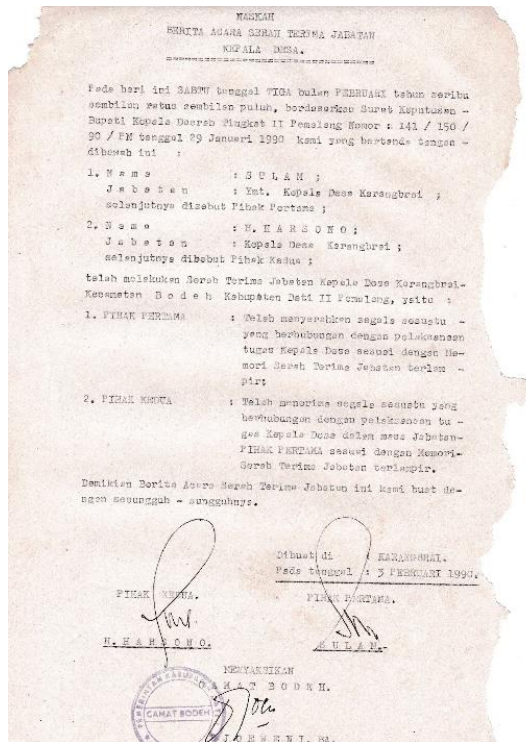
Gambar 7. Nama Jalan Kyai Usman
Sumber: Dokumentasi Arif Rahman Bramantya tahun 2019



Gambar 8. Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Oesman
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Harsono: Kepala Desa Periode 1974-1998

Harsono merupakan penduduk asli dari desa Bandaran yang menikah dengan penduduk asli desa Karangbrai. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No: Huk.B.II/12/62/74, terhitung tanggal 2 Januari 1974, Harsono diangkat menjadi Kepala Desa Karangbrai. Sebelum menjabat sebagai kepala desa, ia menjabat carik (sekretaris desa) menggantikan Waryadi. Harsono diangkat menjadi carik tertanggal 22 Desember 1960, sesuai dengan surat pengangkatan No.22/1961. Pada waktu itu, ada kekosongan jabatan kepala desa karena Kepala Desa Oesman meninggal dunia. Harsono mengikuti pemilihan kepala desa dan terpilih menjadi kepala desa pada tahun 1974. Seiring dengan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa pada waktu itu, keluarlah PP No.5/1975 tentang peraturan perubahan masa jabatan dan struktur organisasi di dalam pemerintahan desa.



Gambar 9. Serah terima jabatan dari Sulam, Ymt. Kepala Desa Karangbrai kepada Harsono
Sumber: Arsip personal H. Harsono

Jabatan sebagai carik dipegang oleh dua orang dengan pembagian tugas masing-masing. Carik 1 cenderung sebagai kaki tangan kepala desa sedangkan Carik 2 berurusan dengan administratif pedesaan. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Harsono pada tanggal 27 Maret 1974. Ia bersedia melepaskan bengkoknya seluas 0,735 Ha untuk dipergunakan sebagai tambahan bengkok Carik II. Pembagian tanah bengkoknya pun dibagi rata. Seharusnya jatah bengkok hanya 4-5 Ha untuk sawah dan 2 Ha untuk tegalan. Jika dibagi dua, tiap orang Carik mendapatkan 2-2,5 Ha sawah dan 1 Ha Tegalan. Masa jabatan Harsono pada waktu itu hanya sampai tahun 1989 dan pemilihan kepala desa periode berikutnya diadakan tahun 1990. Kekosongan jabatan selama setahun dipegang sementara oleh Sulam sebagai Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa (YMT Kepala Desa) tertanggal 27 September 1989, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No.141/150/90/PM.

Pemilihan kepala desa pada tahun 1989 diikuti oleh 4 calon antara lain; Harsono, Ngadimin (menantu Harsono), Mulyadi, Tarmidi (Kaur Pembangunan). Setelah diadakan penyeleksian berkas, yang dinyatakan lolos hanya dua orang yakni Harsono dan Tarmidi. Namun sehari sebelum pemilihan dilaksanakan, Tarmidi menerima surat susulan yang berisikan bahwa dirinya tidak lolos seleksi administratif. Untuk itu, pada hari pemilihan dimulai hanya ada calon tunggal yaitu Harsono. Maka, kepemimpinan selanjutnya tetap dipegang oleh Harsono.

Terkait dengan kepemilikan tanah semasa kepemimpinan Harsono, sesuai dengan UUPA tahun 1960, kepemilikan tanah di atas 5 Ha harus didistribusikan, sedangkan untuk tanah bengkok dibagi untuk pembuatan jalan. Menjelang peristiwa G30 S tanah bengkok yang awalnya dibagi, dikembalikan sesuai dengan Letter C. Konflik masalah tanah tidak terjadi di desa Karangbrai. Warga yang keberatan atas kepemilikan tanah minta diukur kembali (Bramantya, 2018).

Di tahun 1998, terkait dengan program jalan setapak ke pertambangan pasir, Harsono juga dituduh telah melakukan aksi kepemilikan sepihak tanah. Namun setelah ditelusuri, yang dilakukan oleh Harsono adalah menggabungkan jalan yang semula terdapat beberapa jalan kecil, digabung menjadi satu menjadi jalan besar, dengan luas tanah sama. Hal ini dibuktikan melalui surat pernyataan yang menerangkan bahwa masing-masing pemilik tanah tidak terdapat

kekurangan pemilikan tanah (Bramantya, 2018). Politik desa yang terjadi di Karangbrai di tahun 1998 membuat Harsono merasa perlu untuk istirahat dari pemerintahan desa. Arsip dan dokumen milik Harsono masih tersimpan dan di kelola dengan baik oleh menantunya.

Peran teknologi dalam diseminasi pengetahuan di era digital

Proses diseminasi informasi dalam rangka pelestarian pengetahuan setidaknya didukung modal sosial, dengan memperkuat dan mempertahankan tradisi lokal di dalam masyarakat desa, serta memberi keterampilan kepada komunitas yang dianggap mampu untuk menjaga tradisi tersebut (Nuryaman, 2017). Upaya untuk memasukkan sebanyak mungkin pengetahuan bersama secara terbuka melalui berbagai media, tidak terbatas pada tanggung jawab akademisi, arsiparis, ataupun pustakawan, tetapi semua elemen masyarakat harus berkolaborasi dan terlibat di dalamnya. Orang awam pun dapat menjadi pencipta pengetahuan dengan penuh kesadaran akan pentingnya dokumentasi (Levine, 2002). Di samping itu, pengetahuan umum yang dihasilkan di luar akademisi sebagai bagian penting dari diskusi tentang bagaimana pengetahuan tersebut muncul dan didiseminasikan sepenuhnya menjadi milik komunitas masyarakat. Dengan perkembangan teknologi informasi, ditambah dengan proyek Palapa Ring yang akan membantu akses jaringan di seluruh pelosok wilayah nusantara, pengelola, pegiat, pemerhati di bidang dokumentasi dan kearsipan dapat menggunakan sarana YouTube, blog, *podcast*, *website* dan media-media lainnya untuk proses diseminasi informasi pedesaan. Program-program media seperti ini sering memasukkan beberapa konten menarik yang dikemas dalam audiovisual, ataupun menjadi basis data.

Contoh inventarisasi dokumentasi *Indigenous Knowledge* dan praktik diseminasi yang dilakukan di India menekankan pentingnya komunitas dalam mempertahankan kepemilikan *Indigenous Knowledge* setempat. Praktik tersebut melibatkan basis data digital dalam menciptakan dan mengelola *Indigenous Knowledge*, proses dokumentasi dan diseminasi seringkali merupakan proses simultan dan saling melengkapi (Sen, 2005). Proses secara bertahap ketika pengetahuan ditambahkan ke dalam basis data, penyebaran informasi, serta akses akan melibatkan beberapa elemen dalam pengelolaannya. Sen pun berpendapat bahwa kepemilikan *Indigenous Knowledge* dan ekspresi budaya tidak didasarkan pada hak individu, tetapi pada sistem hak kolektif yang dikelola berdasarkan pengelolaan menurut hukum adat yang berlaku (Sen, 2005). Contoh lain yang dikaji oleh Sen adalah Kalpavriksh dan Beej Bachao Aandolan (*Save the Seeds Campaign*), kelompok aksi lingkungan. Mereka mendokumentasikan praktik pertanian di sebuah desa di Uttar Pradesh. Hasil dokumentasi tersebut disimpan di desa dan juga oleh Kalpavriksh. Dalam kajiannya, sebuah kesepakatan dibuat bahwa distribusi hanya mungkin dilakukan dengan persetujuan penduduk desa (Sen, 2005). Dokumentasi ini menyediakan kerangka kerja untuk melindungi *Indigenous Knowledge* dari pembajakan.

Dari beberapa contoh di atas, penyebaran informasi yang mengandung *Indigenous Knowledge* melalui dokumentasi dengan alat bantu teknologi akan semakin mudah, namun harus tetap memperhatikan legalitas dan hak cipta yang nantinya berdampak pada perkembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat. Arsiparis dan pustakawan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi (Adelia, 2016). Kajian dan pengembangan sistem informasi desa memperlihatkan bahwa informasi dan pengetahuan dianggap menjadi kebutuhan pokok bagi para pencari informasi. Penyebaran informasi melalui Desa Informasi sebagai bagian dari proyek insititusi memperlihatkan bahwa peran teknologi berdampak signifikan dalam proses diseminasi (Tjiek, 2006). Tjiek (2006) mengkaji praktik *Indigenous Knowledge* di Universitas Kristen Petra di Surabaya, Indonesia. Desa Informasi merupakan program universitas untuk mengembangkan koleksi digital berupa arsip dan dokumen yang dihasilkan oleh mahasiswa. Program ini menitikberatkan pustakawan dalam melakukan proses pengumpulan (*collecting*) hingga

membangun jaringan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi. Praktik ini merupakan strategi proaktif untuk menyerap sebanyak mungkin sumber daya dari masyarakat (Tjiek, 2006). Dalam praktiknya, sistem informasi akan berkaitan dengan metadata. Metadata yang memadai adalah kunci dalam penyediaan akses ke dalam *Indigenous Knowledge*. Pemahaman akan metadata berarti mencari tujuan dan alasan kenapa metadata tersebut harus dibuat.

Pentingnya inisiatif individu dalam praktik dokumentasi setidaknya menjadi usaha pelestarian pengetahuan di pedesaan. Individu yang memiliki latar belakang dan pandangan jauh ke depan untuk mengenali urgensi dan kebutuhan akan dokumentasi sebagai basis pengetahuan memerlukan dukungan penuh jika sebuah proyek dokumentasi akan diimplementasikan. Inisiatif arsiparis dan pustakawan dapat menjadi percikan untuk memulai proyek dokumentasi, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam membangun jaringan pengetahuan bersama secara luas. Peran arsiparis dan pustakawan dalam mengembangkan metadata untuk proyek-proyek dokumentasi tersebut juga sangat penting.

SIMPULAN

Program pelestarian pengetahuan melalui seleksi dan penilaian arsip personal pemimpin dan tokoh masyarakat desa setidaknya dapat membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arsip demi pengembangan daerah pedesaan serta proses pembelajaran edukatif bagi generasi berikutnya. Ragam aspek mulai dari informasi sosial, budaya, keagamaan maupun ekonomi yang terdapat di pedesaan bukan hanya dituturkan melainkan bagaimana informasi-informasi lisan tersebut dapat didokumentasikan dan didiseminasikan dengan baik dalam berbagai media sesuai dengan kaidah kearsipan. Pemetaan arsip tokoh masyarakat dan pemimpin desa, khususnya di desa Karangbrai sebagai salah satu daerah bekas distrik Comal dengan narasi historis yang melingkupinya setidaknya menjadi proyek awal untuk mewujudkan pelestarian pengetahuan dalam rangka mengenalkan tokoh yang telah berkontribusi untuk mengembangkan dan membangun desa. Melalui pengamatan langsung, pencarian data tokoh masyarakat dan pemimpin desa, identifikasi serta pemetaan arsip, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai jenis dan kondisi arsip yang dimiliki di desa Karangbrai, sehingga lembaga pemerintahan desa dapat secara tepat merumuskan strategi dalam pelestarian arsip dan dokumen yang dimiliki oleh warganya.

Pemetaan arsip tokoh masyarakat dan pemimpin desa Karangbrai menggambarkan bagaimana program seleksi dan penilaian dilakukan serta strategi yang ideal untuk diseminasi informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perbedaan dan karakteristik pedesaan pun akan berpengaruh terhadap ciri khas daerah yang digambarkan dalam kepemilikan arsip. Oleh karena itu, pengelolaan arsip personal menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan atau pewaris keturunan agar memori lintas generasi tetap terjaga dan lestari. Dukungan penuh dari pemerintahan desa terhadap pelestarian arsip personal warganya juga menjadi faktor pendukung dalam menumbuhkan gerakan sadar arsip. Kaitannya dengan memori daerah, desa wajib untuk mengelola arsip yang dimiliki, sehingga potensi desa dapat digali dan informasi yang mengandung pengetahuan dapat dilestarikan.

Gambaran sederhana ini dapat membantu dalam menganalisis wacana dan praktik dokumentasi di pedesaan. Dengan melihat proses pendefinisian terminologi *Indigenous Knowledge* di pedesaan dalam domain kearsipan, sedikit banyak belajar bahwa pemahaman *Indigenous Knowledge* tidak serta merta dapat disamakan dengan *knowledge common*. Namun, *Indigenous Knowledge* tampaknya menempatkan dirinya dalam *knowledge common* khususnya di daerah pedesaan. Keberadaan *Indigenous Knowledge* di pedesaan perlu diidentifikasi dan sanggup untuk di dokumentasikan, dilestarikan, serta didiseminasikan. Kegiatan-kegiatan ini

dilakukan agar *Indigenous Knowledge* yang dapat dianggap sebagai pengetahuan bersama tersebut dilakukan tidak hanya oleh arsiparis atau pustakawan tetapi kelompok komunitas pedesaan yang sadar akan pentingnya informasi dan pengetahuan lokal yang tentu saja berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Komunitas ini dapat menjadi komponen penting untuk membangun pengetahuan bersama secara holistik dengan dukungan dari pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada karena penelitian ini sebagian besar didanai oleh Hibah Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen Muda dengan kontrak 3943/UN1/DITLIT/DIT-LIT/LT/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2005). The Politics of Indigenous Knowledge dalam Nakata, M., & Langton, M. (Eds.). *Australian Indigenous Knowledge and Libraries*. Canberra: Australian Academic & Research Libraries for the Australian Library and Information Association. Retrieved from <https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/19486/1/E-book.pdf>
- Adelia, N. (2016). Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam pengetahuan Tradisional. *Records and Library Journal*, 2(1), 51-57. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/rlj.V2-I1.2016.51-57>
- Arnold, J. (2017). Walking in Both Worlds: Rethinking Indigenous Knowledge in The Academy. *International Journal of Inclusive Education*, 21(5), 475-494. DOI: <https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1218946>
- Boomgard, P. (1996). Selayang Pandang Perkembangan Ekonomi dan Sosial Daerah Comal Periode 1750-1940 dalam Kano, H., Frans, H., & Suryo, D. (ed). *Di Bawah Asap Pabrik Gula, Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press & AKATIGA. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347982>
- Bramantya, A.R. (2018). Rural Turmoil and Radicalization: Javanese Coastal Communities in the Mid-Twentieth Century, A Case Study about Comal District in Southern Area. *Journal of Cultural Symbiosis Research*, 12, 56-74. Retrieved from: https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3714&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
- Briet's, S. (1951). *What is Documentation*. Retrieved from <https://info.sice.indiana.edu/~roday/what%20is%20documentation.pdf>
- Ryser, R. C. (2012). *Encyclopedia of Sustainability*. Berkshire 122 Castle Street Great Barrington, MA 01230. Retrieved from https://www.academia.edu/download/33842549/rcr_indigenous_peoples_and_traditional_knowledge_birkshire_vol_5_encyclopedia_of_sustainability_2012_ryser.pdf
- Cook, T. (1992). Documentation Strategy. *Archivaria*, 34. Retrieved from <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11849>
- Cordell, J., (1995) "Traditional Ecological Knowledge: Wisdom for Sustainable Development. Edited by Nancy M. Williams and Graham Baines, 1993. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, Australian National University", *Journal of Political Ecology* 2(1), 43-47. doi: <https://doi.org/10.2458/v2i1.20159>

- Duranti, L. & Franks, P. C. (2017). *Encyclopedia of Archival Science*. Lanham: Rowman & Littlefield. <https://rowman.com/ISBN/9780810888104/Encyclopedia-of-Archival-Science>
- Fleckner, J. A. (1977). *Archives & Manuscript: Surveys*. Chicago: The Society of American Archivist. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000049804>
- Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=122611>
- Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. (1990). *Pola Kepemimpinan dan Analisis Antar Golongan di Desa Jawa dalam Perspektif Historis*. Yogyakarta, Indonesia: Effendhie, M.
- Ham, F. G. (1993). *Selecting and Appraising Archives and Manuscript*. Chicago: The Society of American Archivist. <https://www2.archivists.org/node/14884>
- Husken, F., Kano, H., & Suryo, D (ed). (1996). *Di bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press & AKATIGA. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=347982>
- Joranson, K. (2008). Indigenous Knowledge and The Knowledge Commons. *The International Information & Library Review*, 40(1), 64-72. DOI: <https://doi.org/10.1080/10572317.2008.10762763>
- Kuntowijoyo. (1993). *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=482013>
- Levine, P. (2002). Building the electronic commons. *The Good Society*, 11(3), 3-9. Retrieved from <https://peterlevine.ws/goodsociety.pdf>
- Lund, N.W., Buckland, M. (2008). Document, documentation, and the Document Academy: introduction. *Archival Science*, 8, 161-164. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10502-009-9076-3>
- Millar, L. (1998). Discharging our Debt: The Evolution of the Total Archives Concept in English Canada. *Archivaria*, 46, 103-146. Retrieved from <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12677>
- Millar, L. (1999). The Spirit of Total Archives: Seeking a Sustainable Archival System. *Archivaria*, 47, 46-65. Retrieved from <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12697>
- Nakashima, D. (ed.). (2010). *Indigenous Knowledge in Global Policies and Practice for Education, Science and Culture*. Paris: UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265855>
- Nuryaman. (2017). Pentingnya Arsiparis Memahami Konsep Pengetahuan Lokal (Indigenous Knowledge). *Prosiding Seminar Internasional Kearsipan Pengembangan Ilmu Karsipan dan Manajemen Arsip di Indonesia*, Yogyakarta, Arsip Universitas Gadjah Mada.
- Okorafor, C. N. (2010). Challenges confronting libraries in documentation and communication of indigenous knowledge in Nigeria. *The International Information & Library Review*, 42(1), 8-13. DOI: <https://doi.org/10.1080/10572317.2010.10762837>
- Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. (1991). *Proyek Penelitian Perubahan Sosial di Distrik Comal 1900-1990, Catatan Lapangan Desa Karangbrai*. Yogyakarta, Indonesia: Kusumindarti, E

- Sari, I.N. (2016). Pemetaan Arsip Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Program Seleksi Arsip Personal di Kulon Progo. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan 2016*. Yogyakarta, Sekolah Vokasi UGM. <https://repository.ugm.ac.id/275184/1/Prosiding%20SNTT%202016%20Halaman%201015%20-%201019.pdf>
- Sen, B. (2005). Indigenous Knowledge for Development: Bringing Research and Practice Together. *The International Information & Library Review*, 37(4), 375-382. DOI: <https://doi.org/10.1080/10572317.2005.10762695>
- Sulistyo-Basuki. (2004). *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=363704>
- Susanti, T., Bramantya, A.R., Ridhollah, Tsabit A. (2019). Socio-Cultural Documentation to Preserving Indigenous Knowledge Through Community Service Program. *2nd Internasional Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2018)*, <https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.46>, Atlantis Press
- Suwadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=991491>
- Tjiek, L. T. (Aditya Nugraha). (2006). Desa Informasi: The Role of Digital Libraries In The Preservation and Dissemination of Indigenous Knowledge. *The International Information & Library Review*, 38(3), 123-131. DOI: <https://doi.org/10.1080/10572317.2006.10762713>

